

# STUNTING

## ANTARA DEFINISI, ANGKA, DAN DERAJAT PEREMPUAN

Akhir-akhir ini menjelang masa jabatan yang segera berakhir, beberapa kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya menurunkan angka stunting agar mendekati angka prevalensi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 14 persen pada 2024. Sekarang



ban yang pemberitaan di media lokal yang memberikan informasi mengenai upaya pencegahan

stunting yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah se-NTB. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGGI) 2021, angka prevalensi stunting NTB sebesar 31,4 persen. Angka prevalensi ini masih jauh di atas prevalensi secara nasional sebesar 24,4 persen. Angka prevalensi stunting di NTB maupun secara nasional masih di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 20 persen.

Meskipun angka prevalensi stunting masih tinggi namun, pemerintah daerah terus berupaya untuk dapat

menurunkan angka prevalensi stunting. Untuk itu, kita sepatutnya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTB karena telah memberikan perhatian besar terhadap persoalan stunting ini. Bahkan, setiap kepala daerah yang ada di seluruh NTB terus memberikan berbagai bentuk arahan yang penting terkait dengan penanganan dan pencegahan stunting dan ini juga menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah daerah.

Namun, saya justru merasa khawatir karena semua sumber daya dikerahkan untuk menangani persoalan ini hanya sekedar untuk memenuhi target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen itu saja. Lupa kalau persoalan stunting tidak hanya sekedar angka saja namun, ada persoalan lainnya yang sering dilupakan, yaitu terkait dengan perempuan yang seharusnya berbagai upaya yang dilakukan haruslah juga mengangkat derajat seorang perempuan.

## **Stunting Merupakan Dampak**

Apabila mengacu pada definisi stunting dari World Health Organization (WHO) maka, stunting merupakan suatu bentuk gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak *adekuat*<sup>1</sup> atau tidak memenuhi syarat. Jadi, stunting bukanlah suatu jenis penyakit, namun merupakan dampak dari adanya kekurangan gizi kronis

---

1. Adekuat: mencukupi kebutuhan zat gizi yang diperlukan bayi. Aman: higienis dalam proses persiapan, pemberian dan penyimpanan makanan bayi.

yang dialami sejak di dalam kandungan ibu.

Seorang anak dapat dikatakan mengalami stunting umumnya dapat kita lihat dari tinggi badannya yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya. Namun harus tetap diingat bahwa stunting bukanlah hanya masalah tinggi badan saja, melainkan adanya keterlambatan pertumbuhan yang kronis, seperti pertumbuhan gigi yang terlambat dan pubertas.

Selain disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pendek yang terjadi pada anak dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor penyebab lainnya, seperti genetik dan penyakit, seperti growth hormone deficiency (GHD), dan penyebab klinis lainnya. Hal ini tentunya juga harus terus diinformasikan kepada masyarakat agar dipahami bersama untuk menghindari terjadinya stigma terhadap anak yang pendek selalu identik dengan stunting. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian bersama untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting atau tidak. Pengukuran tinggi badan berdasarkan usia yang selama ini dilakukan di posyandu harusnya perlu kehati-hatian, karena pengamatan terhadap tumbuh kembang anak harus secara cermat dan teliti dilakukan selama masa pertumbuhan anak, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan.

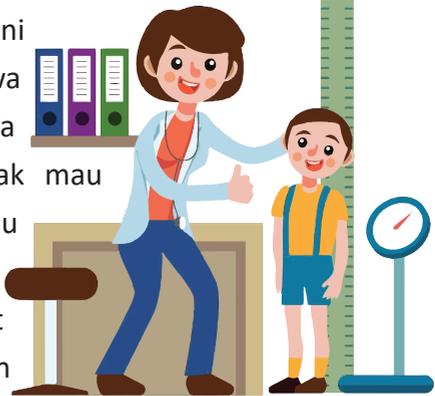
## **Target Penurunan Stunting Di NTB: Bukan Sekedar Mengejar Angka**

Saat ini, pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting di seluruh wilayah

NTB sebesar 14 persen pada 2024, menyesuaikan dengan target nasional. Hal ini berarti pemerintah daerah mengharapkan terjadinya penurunan sebesar 19,49 persen dalam enam tahun sejak hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 Provinsi NTB (33,49%).

Berdasarkan data prevalensi terbaru (SSGI 2022) pada awal tahun 2023 ini, angka prevalensi stunting di Provinsi NTB meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 31,4 persen pada 2021 meningkat menjadi 32,7 persen pada 2022.

Melihat pergeseran dari data ini tentunya menunjukkan bahwa target pimpinan daerah harusnya dapat lebih realistis kalau tidak mau dikatakan sangat ambisius. Perlu diingat bahwa, penanganan stunting sangat erat keterkaitannya dengan merubah perilaku masyarakat, dan hal ini



membutuhkan jangka waktu yang panjang atau setidaknya memakan waktu sepuluh hingga 15 tahun. Dari beberapa referensi penanganan stunting di beberapa negara yang penulis baca, seperti negara Peru yang mampu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 18,2 persen dalam kurun waktu 17 tahun.

Diperlukan suatu pemahaman yang sama terhadap stunting ini, karena stunting itu sebenarnya merupakan outcomes dan bukan penyakit. Sehingga perbaikan-perbaikan terhadap kondisi lingkungan yang tidak adekuat harus terus digalakkan. Ketika

lingkungan tersebut sudah mengalami perbaikan, prevalensi tengkes menjadi satu indikator yang sangat penting untuk menggambarkan perbaikan yang sudah terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil SSGI 2022 pada stunting yang terjadi di beberapa kelompok umur di NTB terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pada kelompok umur 0-5 bulan terjadi peningkatan, yaitu 9,42 persen meningkat menjadi 19,01 persen. Kemudian pada kelompok umur 12-23 bulan, dari 30,44 persen menjadi 34,34 persen, serta pada kelompok umur 36-47 bulan, dari 33,14 persen menjadi 39,94 persen.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah saatnya mengejar target angka prevalensi bukan menjadi fokus utama. Namun, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah mengukur indikator lingkungan yang telah diintervensi untuk dapat memaksimalkan keberadaan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dana, waktu maupun sumber daya manusia, agar dapat dimanfaatkan lebih efektif dan efisien lagi.

## **Meningkatkan Derajat Perempuan**

Berbagai intervensi penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini sebagian besarnya menyoal perempuan. Dalam arti kata, bahwa berbagai kondisi fisik yang terjadi pada perempuan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya stunting, seperti rendahnya pendidikan ibu, usia menikah yang kurang dari 20 tahun, fisik ibu yang kurus, konsumsi gizi yang kurang sebelum dan selama hamil, serta status

kesehatan perempuan yang rendah.

Untuk itu, dalam mengatasi stunting tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik perempuan saja, seperti pemberian tablet penambah darah atau peningkatan asupan gizi seimbang. Namun, intervensi penanganan stunting harus juga diarahkan kepada upaya peningkatan kapasitas dan posisi perempuan, baik dalam rumah tangga maupun komunitas.

Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa persoalan otonomi perempuan masih menjadi tantangan pembangunan. Hal ini berdampak terhadap pengambilan keputusan tentang kesehatan yang tidak berada di tangan perempuan. Selain itu, pandangan terhadap norma jender yang masih rendah pada perempuan telah berdampak pada kerentanan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya juga kondisi tersebut semakin membuat perempuan tidak berdaya dalam kehidupan sosial.

Bagi penulis, intervensi penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, tablet zat besi selama hamil, atau bahkan kampanye dan pemberian asupan gizi protein dosis tinggi tidak menjadi jaminan bagi kesehatan perempuan dapat terjamin. Menurut penulis bahwa saat ini yang terpenting untuk dilakukan adalah terus berupaya melakukan intervensi-intervensi terhadap norma-norma jender yang bertujuan untuk seluruh komunitas memberikan dukungan kepada perempuan agar dapat memiliki derajat kesehatan fisik yang lebih baik lagi. Semua stakeholders harus intervensi stunting dengan memperkuat peran perempuan

dan bukan menjadikan tubuh perempuan hanya sebagai obyek kesehatan semata.

Salah satu contoh yang dapat penulis ilustrasikan adalah, ketika berbicara tentang intervensi stunting melalui perbaikan sanitasi dan air bersih, seharusnya perempuan dapat lebih dilibatkan. Contoh sederhana saja, ketika pemerintah daerah ingin memberikan bantuan berupa pembangunan sumur air bersih, sebaiknya menanyakan terlebih dahulu kepada perempuan dimana sebagiknya akan dibangun untuk memudahkan mereka mengakses bantuan tersebut. Karena apabila perempuan kesulitan untuk dapat mengakses bantuan tersebut maka, sia-sialah bantuan atau solusi yang diberikan tersebut.

Contoh lainnya adalah ketika ingin mengajarkan pembuatan pangan yang bergizi tinggi kepada perempuan, libatkanlah perempuan di daerah yang akan dilakukan intervensi stunting. Jangan hanya sekedar memberikan pelatihan saja tanpa pernah memahami apakah materi cara pembuatan bahan pangan bergizi itu apabila dipraktikkan akan menyita waktu perempuan selain mengurus rumah tangganya, kemudian apakah

bahan yang akan digunakan tersebut sangat mudah untuk diperoleh ataukah bahan pangan tersebut rumit dalam pembuatannya.

Penulis juga ingin menyampaikan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan perempuan maka, pemerintah daerah sudah harus memulai untuk melibatkan laki-laki dalam upaya penanganan prevalensi stunting di seluruh wilayah NTB. Laki-laki memiliki peran yang sama besar dengan perempuan dalam hal perawatan dan pengasuhan anak, terutama hal ini terkait dengan peran laki-laki dalam memastikan benih yang ditanam memiliki kualitas dan bersama-sama sang istri dapat memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik hingga dewasa dan mandiri.

Seorang suami perlu untuk mengenali kehamilan berisiko serta mengetahui harus bagaimana bertindak ketika kondisi tersebut terjadi, tidak hanya mengantarkan istri ke bidan atau dokter sebatas tempat parkir atau teras klinik saja. Kemudian, kampanye dan pemberian informasi mengenai upaya pencegahan stunting agar dapat diberikan secara masif kepada laki-laki,



terutama informasi mengenai laki-laki yang dapat mengambil alih tugas domestik yang selama ini dilakukan oleh perempuan ketika masa nifas, termasuk merawat anak yang sudah ada dan tidak minta dilayani istri untuk kebutuhan sehari-hari sampai kondisi ibu benar-benar pulih.

Pemerintah daerah perlu juga untuk terus memperbaharui konsep maskulinitas, bahwa laki-laki sejati adalah laki-laki yang anaknya tidak stunting. Hal ini juga untuk merubah paradigma yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa seorang laki-laki yang mengerjakan tugas-tugas domestik seringkali dianggap sebagai suami-suami takut istri.